

PEMETAAN KEKUATAN DAN KEPENTINGAN STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE DI PULAU BAAI BENGKULU

Abdul Kholek¹⁾, Muhammad Izzudin²⁾

¹⁾ Jurusan Sosiologi, Universitas Sriwijaya

²⁾ Jurusan Sosiologi, Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Kawasan mangrove merupakan kawasan yang cukup populer dalam pengembangan wisata dewasa ini. Kawasan mangrove menyimpan potensi pariwisata yang dapat terus dikembangkan. Dalam pengembangan wisata menuntut adanya aktor atau stakeholder yang sangat penting peranannya. Paper ini menjelaskan bagaimana peran stakeholder punya peranan yang besar dalam keberhasilan pengembangan ekowisata mangrove di Pulau Baai, Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui FGD, indepth interview kepada stakeholder yang berperan dalam pengembangan ekowisata sebanyak 18 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) stakeholder yang paling berperan dalam pengembangan ekowisata adalah masyarakat lokal (*civil society*) dan (2) pengaruh yang besar didalam penentuan keberhasilan pengembangan ekowisata dipengaruhi oleh kekuatan lurah sebagai aktor state di tingkat local. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi secara lebih mendalam mengidentifikasi aktor, kekuatan dan kepentingannya dalam ekowisata. Secara praktis, dengan mendapatkan peta pemangku kepentingan, proses pengembangan ekowisata akan dapat dilaksanakan dengan lebih terarah.

Kata Kunci: ekowisata, pengembangan wisata, stakeholder, kepulauan

ABSTRACT

Mangrove area is an area that is not very favorable in tourism development. However, the mangrove area offers tourism potential that can continue to be developed. The development of this tourism requires actors or stakeholders who have a very essential function. This study discusses how the participation of stakeholders plays a large influence in the successful development of mangrove ecotourism on Baai Island, Bengkulu. The approach employed in this research is indepth interviews with 18 informants who play a role in ecotourism development. The results showed that (1) the most significant stakeholder in the development of ecotourism is the local community (civil society) and (2) the key effect in determining the success of ecotourism development is influenced by the power of the lurah as local authority. Academically, this research adds more profoundly to identify actors, their abilities and interests in ecotourism. Practically, by acquiring a stakeholder map, the ecotourism development process will be carried out in a more concentrated manner.

Keywords: *ecotourism; tourism development, stakeholder, archipelago*

PENDAHULUAN

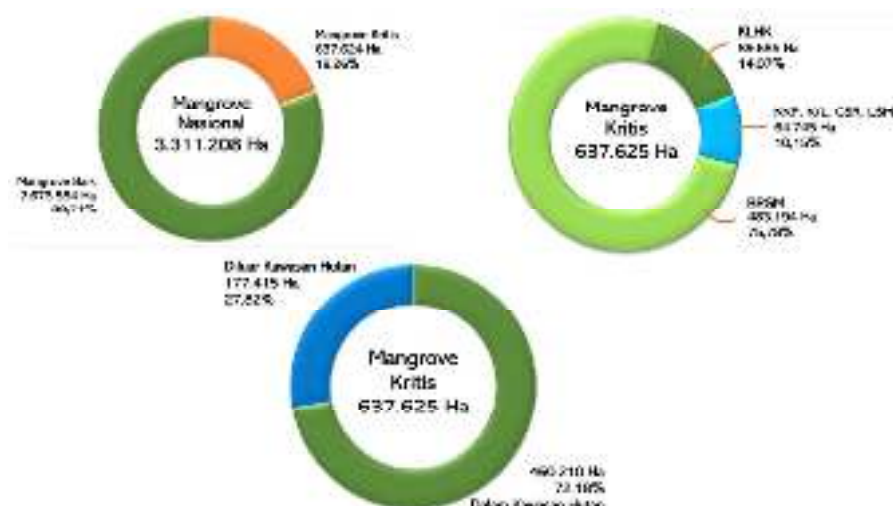
Kawasan mangrove sebagai kawasan lindung telah menarik banyak penelitian misalkan tentang konservasi keanekaragaman hayati, hal ini karena kawasan lindung (KL), diidentifikasi sebagai strategi paling efektif yang digunakan di dunia untuk konservasi keanekaragaman hayati (Borrini, Kothari, & Oviedo, 2004; Mukul, 2007). Banyak KL telah dibuat sebagai strategi ideal untuk melestarikan keanekaragaman hayati, dan pada saat yang sama menguntungkan penduduk lokal (Kimengsi, Aung, Pretzsch, Haller, & Auch, 2019). Dalam kebanyakan kasus, pembentukan KL ini mengadopsi pendekatan “benteng (fortress)” untuk pengelolaan kawasan lindung. Pendekatan ini menganggap KL sebagai “hutan belantara” yang masih asli, tidak terbuka untuk pendudukan dan penggunaan manusia (Pyhälä, Oroza, & Counsell, 2016; Kimengsi & Azibo, 2017; Forje, Tchamba, & Eno-Nku, 2020). Sayangnya, pendekatan konservasi keanekaragaman hayati ini terkadang mengakibatkan ancaman terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat miskin pedesaan yang tinggal di sekitar kawasan lindung di negara-negara berkembang (Amin, Zaehring, Schilch, & Koné, 2015).

Selain itu penelitian tentang kawasan mangrove untuk kepentingan wisata juga sudah banyak dilakukan, karena kawasan hutan mangrove juga dianggap memiliki potensi wisata yang cukup besar. Sehingga pentingnya kawasan mangrove dijadikan salah satu destinasi wisata. Kegiatan rekreasi bakau termasuk hiking dan berperahu – sering kali dipusatkan di sekitar pengamatan satwa liar – dan memancing. Sementara banyak pengunjung menjadi peserta dalam perjalanan satu hari atau setengah hari, beberapa melakukan perpanjangan masa tinggal untuk rekreasi memancing dan perjalanan berperahu semalaman. Mangrove mungkin bukan pendorong utama untuk pilihan tujuan, tetapi mereka menawarkan daya tarik populer, yang dapat mempengaruhi pilihan tujuan, dan popularitas mereka tampaknya tumbuh (Avau, Cunha-Lignon, De Myttenaere, Godart, & Dahdouh-Guebas, 2011).

Saat ini, ekowisata menjadi salah satu alternative untuk mendukung pelestarian ekologi mangrove tanpa memarginalkan akses bagi para nelayan

untuk peningkatan mata pencarian di sekitar kawasan lindung (Dologlou & Katsoni, 2016). Sebagai strategi mata pencaharian yang bergantung pada sumber daya, strategi ini dapat membantu mengentaskan kemiskinan di dalam dan sekitar kawasan lindung dengan menyediakan pilihan mata pencaharian baru melalui keterampilan baru, membuka peluang kerja alternatif bagi penduduk lokal seperti pembersih, juru masak, resepsionis, tukang kebun, pemandu, penari dan penjaga (Harilal, 2018; Sama & Molua, 2019). Pada saat yang sama, ekowisata dapat berkontribusi pada konservasi kawasan konservasi melalui pendidikan lingkungan, peluang mata pencaharian alternatif bagi para pengangguran, pembagian manfaat pendapatan konservasi berbasis ekowisata kepada masyarakat lokal dan pendapatan yang dihasilkan untuk memfasilitasi upaya konservasi (Imanishimwe, Nsengimana, & Nsengumuremyi, 2018).

Secara global luas hutan mangrove di Dunia saat ini yaitu 16.530.000 Ha, sedangkan Indonesia memiliki 3.490.000 Ha atau 21% mangrove dunia. Jika dilihat dalam data terbaru luas mangrove mengalami penurunan yaitu tercatat 3.311.208, dimana 637.624 Ha (19,26%) dalam kondisi kritis (atau penutupan tajuk kurang dari 60%), sedangkan mangrove dalam kondisi baik seluas 2.673.548 (80,74%). Dari mangrove kritis tersebut, berdasarkan kewenangan dimana 460.210 ha (72,18%) berada dalam kawasan hutan dan 177.415 ha (27,82%) diluar kawasan hutan (KKP Indonesia, 2020).



Sumber: kementerian kelautan dan perikanan (KKP) Indonesia, 2020.

Upaya pengelolaan dan pelestarian ekosistem mangrove telah menjadi salah satu fokus dari berbagai kementerian dan lembaga, sektor privat, akademisi dan LSM atau NGO. Misalkan BRGM, KLHK, KKP, Kemendes, CSR Perusahaan dan LSM telah bersama-sama melakukan perbaikan ekosistem mangrove dengan pembagian daerah rehabilitasi dimana BRGM akan melakukan rehabilitasi di 483.194 Ha (75,78%), KLHK di 89.685 Ha (14,07%) dan KKP, K/L, CSR dan LSM di 64.745 Ha (10,15%) (KKP Indonesia, 2020).

Kawasan ekowisata mangrove sebagai salah satu kawasan penting bukan hanya untuk konservasi keanekaragaman hayati tetapi juga memiliki arti penting bagi nelayan. Sehingga kondisi tersebut seringkali memunculkan banyak aktor/stakeholders yang berkepentingan didalamnya. Sayangnya, literatur ilmiah tentang kajian ini belum banyak ditemukan. Sebagian besar penelitian tentang ekowisata memang telah mengidentifikasi stakeholder dan peranannya dalam pengembangan ekowisata. Namun, sejauh pengamatan penulis, studi untuk memetakan aktor secara lebih mendalam, termasuk mengkaji kekuatan dan kepentingannya masih belum banyak didiskusikan (Chirozva, 2015; Fafurida, Oktavilia, Prajanti, & Mareta, 2020; Kuvan & Akan, 2012; Mendoza-Ramos & Prideaux, 2018; Rudianto & Ridho, 2019). Kontestasi aktor didalam pengembangan ekowisata mangrove menjadi salah kajian yang cukup menarik dan belum banyak dilakukan. Sehingga dengan pertimbangan tersebut artikel ini mencoba menawarkan kajian pemetaan kekuatan dan kepentingan aktor dalam pengembangan ekowisata mangrove di Pulau Baai Bengkulu. Tujuan utama penelitian ini adalah *pertama*; mengeksplorasi stakeholder yang paling berperan dalam pengembangan ekowisata?, *kedua*; bagaimana kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) stakeholder dalam penentuan keberhasilan pengembangan ekowisata?.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Ekowisata dan Pembangunan Ekowisata

Istilah ekowisata adalah sebuah konsep baru-baru ini, yang telah mengalami kebingungan mengenai etimologi atau asal usulnya (Fennell, 2001). Namun asal-

usulnya dapat dilacak sejauh tahun 1970-an, ketika banyak gerakan lingkungan di seluruh dunia menekankan bentuk pariwisata yang berkelanjutan dan lebih bertanggung jawab, karena hilangnya hutan hujan dan habitat lain yang terancam punah di seluruh dunia.

Kerugian ini telah memaksa Bank Pembangunan Internasional dan Bank Dunia pada tahun 1970 untuk berhenti meminjamkan uang kepada perusahaan pariwisata dan hanya harus memulai kembali pinjaman pada tahun 1990 di bawah judul ekowisata (Miller, 1993). Menurut Nelson (1994), konsep ekowisata adalah konsep sudah lama menjadi isu sejak tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an karena meningkatnya kekhawatiran para peneliti tentang bagaimana memperbaiki penggunaan sumber daya alam yang tidak tepat dengan diperkenalkannya istilah “pengembangan lingkungan”.

Kata ekowisata pertama kali digunakan pada tahun 1980-an oleh Ceballos-Lascurain (Ceballos-Lascurain, 1993; 1996), suatu upaya untuk melakukan perjalanan di wilayah yang masih alami, untuk sebuah penelitian, atau hanya melakukan kunjungan wisata untuk menikmati pemandangan flora dan fauna yang ada di alam bebas, selain itu juga tradisi masyarakat di sekitar wilayah yang masing sangat alami (Higham, 2007). Definisi ini dianggap lebih fokus pada wisata alam dengan penekanan pada pendidikan dan pengembangan produk dan aktivitas pariwisata yang berkelanjutan (Buckley, 1994). Pada tahun 1990, The International Ecotourism Society (TIES) mengusulkan definisi ekowisata yang dapat diterima secara luas (TIES, 2005).

Menurut TIES, ekowisata adalah suatu kunjungan atau perjalanan dikawasan alami dengan tujuan pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan ekonomi lokal (TIES, 2005). Pada bulan Oktober 1996, International Union for Conservation of Nature (IUCN), mengadopsi definisi kerja ekowisata sebagai tanggapan terhadap konsep yang berkembang pesat. Bagi IUCN, ekowisata adalah suatu perjalanan wisata yang bertanggungjawab terhadap ekologi di wilayah-wilayah yang masing alami dalam mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati baik flora, fauna maupun biota laut lainnya. Ekowisata berkontribusi bagi

peningkatan ekonomi masyarakat serta memberikan kebermanfaatan pada aspek sosial dan juga budaya masyarakat setempat (Wearing & Neil, 2009).

Kawasan Mangrove

Mangrove adalah ekosistem pesisir yang memiliki interaksi yang kuat antara laut, air asin, sungai dan perairan daratan. Kondisi tersebut membuat ekosistem mangrove sangat kaya akan keanekaragaman flora, fauna dan biota laut yang sangat tinggi (Macintosh & Ashton, 2002). Mangrove hidup di daerah tropis dan subtropis, terutama pada 25°LU dan 25°S. Tumbuhan ini bergabung dengan organisme lain (jamur, mikroorganisme, alga, fauna dan tumbuhan lain) untuk membentuk komunitas mangrove. Komunitas mangrove berinteraksi dengan faktor abiotik (iklim, udara, tanah dan air) untuk membentuk ekosistem mangrove (Sengupta, 2010). Tanpa tumbuhan mangrove, kawasan tersebut tidak dapat disebut sebagai ekosistem mangrove (Dahdouh-Guebas, Kairo, Jayatissa, Cannicci, & Koedam, 2002).

Mangrove merupakan bentang alam yang menggambarkan wilayah pesisir tropis didominasi oleh pohon atau semak yang tumbuh di air asin. Mangrove adalah struktur hutan yang khas di daerah tropis dan mikro-subtropis, terletak di dataran rendah dan pantai yang tenang, berlumpur dan sedikit berpasir, dengan air laut yang bergelombang (Arief, 2003).

Stakeholder

Stakeholders dapat dibagi kedalam tiga kelompok menurut Maryono dalam (Handayani & Warsono, 2017) antara lain:

a. Stakeholders primer

Stakeholder primer adalah stakeholder utama yang bersinggungan langsung dengan aktivitas, proyek atau pembangunan. Sehingga stakeholder atau aktor tersebut merasakan dalam langsung dampak baik positif maupun negatif dari suatu kegiatan. Stakeholder primer tentunya memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap suatu aktivitas di wilayah mereka. Dalam implementasi program atau kegiatan stakeholder utama sangat penting untuk

berpartisipasi dalam semua tahapan kegiatan dari perencanaan sampai pada evaluasi kegiatan.

b. Stakeholders kunci

Stakeholder kunci merupakan stakeholder dari unsur pemerintah atau *state* terutama ditingkat lokal, yang memiliki otoritas formal dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Stakeholder kunci dalam penelitian ini adalah stakeholder yang bertanggungjawab dalam pengembangan ekowisata mangrove.

c. Stakeholders sekunder atau pendukung

Stakeholder pendukung adalah individu, kelompok atau organisasi baik formal maupun informal yang tidak bersinggungan langsung dengan kegiatan atau sebuah proyek, tetapi memiliki perhatian atau kepentingan yang cukup besar terhadap suatu proyek tertentu. Misalkan kelompok NGO aktor pemerhati lingkungan dan lain sebagainya.

METODE

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kelurahan Sumber Jaya yang merupakan kelurahan yang masuk dalam kawasan mangrove Pulau Baai, Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pengumpulan data melalui *indepth interview*, serta FGD kepada stakeholder di wilayah penelitian (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006); (Rahardjo, 2011) kepada 18 informan. Informan sekaligus sebagai aktor dipilih dengan metode snowball sampling dengan kriteria: (1) dianggap sebagai aktor oleh masyarakat atau key informan yang berada di kawasan mangrove Pulau Baai, Bengkulu, (2) Tergabung dalam komunitas pengembangan wisata, (3) masuk kedalam salah satu kategori *state*, *civil society* dan *privat sector*. Selain *Indepth Interview*, juga digunakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan kuesioner dalam pencarian data. Nama asli informan dalam penelitian ini dirahasiakan dan diganti dengan menggunakan istilah informan dengan urutan 1 hingga 18.

Tabel 1. Informan di Kelurahan Sumber Jaya

No	Informan (I)	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan	Posisi Aktor	Kategori Aktor
1	Informan 1 (I1)	P	54	Lurah	Organisasi	<i>State</i>
2	Informan 2 (I2)	P	45	Sekretaris Lurah	Organisasi	<i>State</i>
3	Informan 3 (I3)	P	52	Ketua LPM dan Ketua LKM	Organisasi	<i>Civil society</i>
4	Informan 4 (I4)	L	35	Ketua RW 06/Tokoh Pemuda/Ketua Kelompok Wisata Mangrove	Organisasi	<i>Civil society</i>
5	Informan 5 (I5)	P	38	Ketua RW 02 Kampung Sejahtera/ Tokoh Perempuan	Organisasi	<i>Civil society</i>
6	Informan 6 (I6)	P	41	Ketua RT 06/Tokoh Perempuan/Kelompok Usaha	Kelompok	<i>Civil society</i>
7	Informan 7 (I7)	P	58	Kepala Sekolah SD 105 Kampung Bahari	Organisasi	<i>State</i>
8	Informan 8 (I8)	L	51	Kepala Sekolah SMP N 25 Bengkulu	Organisasi	<i>State</i>
9	Informan 9 (I9)	L	56	Kepala Sekolah SMK N 6 Bengkulu	Organisasi	<i>State</i>
10	Informan 10 (I10)	P	34	Tokoh Perempuan	Individu	<i>Civil society</i>
11	Informan 11 (I11)	L	55	Penghulu Adat	Individu	<i>Civil society</i>
12	Informan 12 (I12)	L	52	Tokoh Agama	Individu	<i>Civil society</i>
13	Informan 13 (I13)	L	42	Ketua RW 01	Organisasi	<i>Civil society</i>
14	Informan 14 (I14)	L	25	Ketua Karang Taruna/Tokoh pemuda	Organisasi	<i>Civil society</i>
15	Informan 15 (I15)	P	55	Tokoh Masyarakat	Individu	<i>Civil society</i>
16	Informan 16 (I16)	L	65	Tokoh Adat	Individu	<i>Civil society</i>
17	Informan 17 (I17)	L	59	Pelaku Usaha Besar (tokeh)	Individu	<i>Privat</i>
18	Informan 18 (I18)	L	42	Pelaku Usaha Besar (tokeh)	Individu	<i>Privat</i>

Sumber: Indepth Interview, 2020

Kelurahan Sumber Jaya terdiri dari 18 informan. Informan yang teridentifikasi yaitu dari stakeholder organisasi 11 orang aktor. Stakeholder organisasi terdiri dari I1 menjabat sebagai lurah, I2 dengan jabatan sebagai sekretaris lurah, I3 sebagai ketua LPM dan ketua LKM, I4 merupakan Ketua RW 6 sekaligus sebagai tokoh pemuda yang cukup aktif di Kampung Bahari. I5 sebagai ketua RW 2 juga sebagai salah satu tokoh perempuan, I6 sebagai ketua RT 06 juga aktif dalam mendampingi masyarakat pelaku UMKM di Sumber Jaya, serta aktif dalam berbagai kegiatan ditingkat kelurahan. I7 sebagai kepala Sekolah SDN 105 Kampung Bahari, I8 sebagai kepala Sekolah SMPN 25 Bengkulu, I9 sebagai Kepala Sekolah SMK N 6 Bengkulu, I13 sebagai ketua RW 01 dan I14 sebagai ketua Karang Taruna.

Sedangkan stakholder individu sebanyak 7 (tujuh) orang aktor yaitu I10 sebagai salah seorang tokoh perempuan yang aktif, I11 sebagai Penghulu Adat, I12 sebagai tokoh agama, I15 sebagai tokoh masyarakat, I16 sebagai tokoh adat, I17 merupakan pengusaha nelayan dan I18 sebagai salah satu pengusaha bidang umum di Kelurahan Sumber Jaya.

Tahap selanjutnya setelah identifikasi informan penelitian, diukur derajat kekuatan (*power*) dan derajat kepentingan (*interest*) (Hasnanda, 2019). Kekuatan diukur dengan 5 (lima) indikator yaitu 1) tingkat Pendidikan (*education*), 2) jaringan (*network*), 3) kekuatan massa (*Mass Power Capability*), 4) tipe kepemimpinan (*Leadership type*) dan 5) kekuatan ekonomi (*Financial Power*). Sedangkan untuk mengukur derajat kepentingan (*interest*) digunakan 5 indikator yaitu 1) Ekonomi (*economy*), 2) Pemberdayaan (*empowerment*), 3) Tenaga kerja (*man power*), 4) Lingkungan (*environment*), 5) infrastruktur (*infrastructure*).

Masing – masing indikator dinilai dengan skala 1 – 5 dimana nilai 1 merupakan nilai terendah atau kekuatan / kepentingan yang rendah dan 5 adalah nilai dengan nilai tertinggi atau memiliki kekuatan / kepentingan yang tinggi terhadap pengembangan wisata. Selanjutnya hasil semua indikator akan di skoring dan dibuat peringkat kekuatan dan kepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Aktor (*stakeholders*)

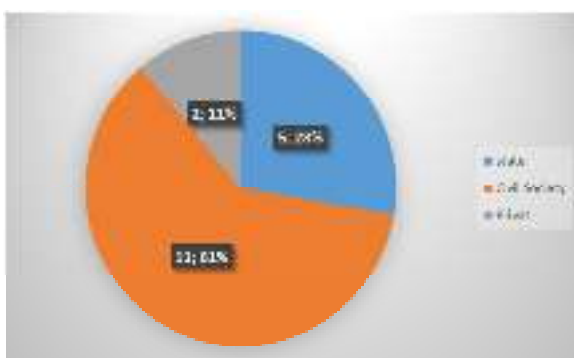
Aktor/stakeholders pihak yang bersinggungan langsung dengan isu dan permasalahan yang sedang terjadi atau berkembang didalam masyarakat. Sebagai mesin penggerak dalam berbagai kegiatan yang ada di masyarakat aktor memiliki berbagai kepentingan yang dimanipulasikan dalam tindakan riil, baik tindakan yang berdampak positif maupun tindakan yang berdampak negatif. Aktor memiliki jejaring dan jangkauan pengaruh yang mampu menggerakkan masyarakat. Latar belakang penguasaan ekonomi, pendidikan, pengetahuan dan teknologi dan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari “ketokohnya” dari masing-masing aktor yang dipetakan. Berdasarkan temuan identifikasi aktor terhadap tiga klasifikasi aktor yaitu individu, kelompok, organisasi atau lembaga. Selain itu aktor tersebut juga memiliki latar belakang yaitu dari kelompok *State* (aktor negara), *Civil society* (aktor masyarakat sipil) dan *privat* (aktor sector bisnis).

Aktor individu merupakan aktor yang bertindak baik rasional maupun non rasional atas dasar perannya sebagai individu dan untuk kepentingan pribadi, maupun kelompok atau golongan. Misalkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan lain sebagainya. Aktor kelompok merupakan aktor yang bertindak atas dasar kepentingan kelompok atau mewakili kelompoknya. Misalkan kelompok tani, kelompok arisan, kelompok pengajian dan lain sebagainya. Sedangkan aktor organisasi merupakan aktor yang bertindak untuk mewakili kepentingan organisasi baik formal maupun organisasi non formal.

Temuan dari identifikasi aktor tersebut sejalan dengan konsep aktor menurut West dan Freeman. Stakeholder adalah aktor individu atau perorangan juga kelompok atau organisasi, yang memiliki pengaruh sekaligus terpengaruh oleh aktivitas atau proyek atau program tertentu (West, 1999) sejalan dengan perspektif aktor diatas (Freeman, 1984) menyampaikan bahwa stakeholder atau kelompok kepentingan adalah aktor yang memiliki kepentingan dan memiliki pengaruh dari sebuah tindakan, proyek atau pembangunan.

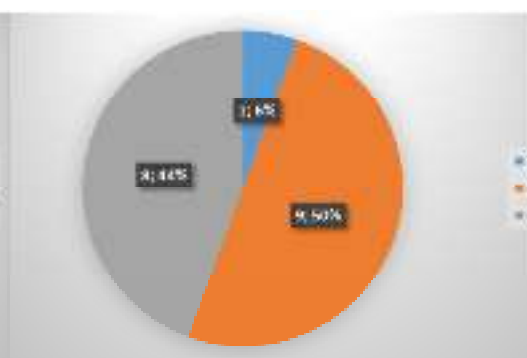
Dalam pemetaan aktor (stakeholder) terkadang ditemukan aktor yang memiliki multi peran, sebagai individu, kelompok dan bahkan organisasi, biasanya aktor ini merupakan aktor yang paling berpengaruh didalam masyarakat. Berdasarkan pendalaman data dan informasi melalui wawancara mendalam dengan key informan, FGD, wawancara dengan aktor dan penyebaran kuesioner, teridentifikasi aktor-aktor (*stakeholders*) yang berpengaruh dan memiliki kepentingan di Kelurahan Sumber Jaya.

Gambar 1. Kategori Aktor di Kelurahan Sumber Jaya



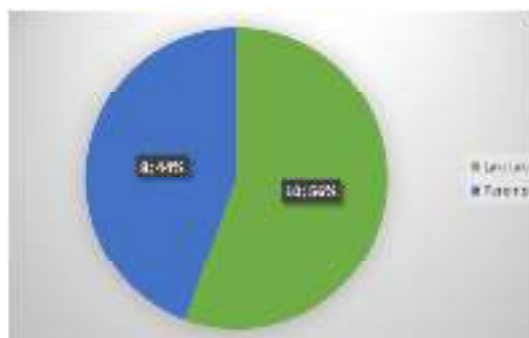
Sumber : Analisis Data Primer, 2020.

Gambar 2. Tingkat Pendidikan Aktor di Kelurahan Sumber Jaya



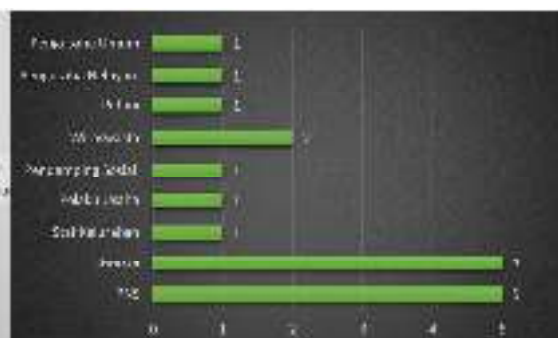
Sumber : Analisis Data Primer, 2020.

Gambar 3. Klasifikasi Berdasarkan Gender Aktor di Kelurahan Sumber Jaya



Sumber : Analisis Data Primer, 2020.

Gambar 4. Jenis Pekerjaan Aktor di Kelurahan Sumber Jaya



Sumber : Analisis Data Primer, 2020.

Sebaran pengelompokan aktor berdasarkan kategori aktor di Kelurahan Sumber Jaya dapat dilihat di Gambar 1. Aktor yang berasal dari kelompok State atau negara yaitu 5 (lima) atau 28 % orang aktor yaitu I1 berkedudukan sebagai lurah, aktor ini cukup berpengaruh di dalam masyarakat. I2 sebagai sekretaris

lurah merupakan salah satu aktor State . Aktor dari lembaga pendidikan juga sebagai aktor State yaitu I7 sebagai Kepala Sekolah SD 105 Kampung Bahari, I8 sebagai Kepala Sekolah SMP N 25 Bengkulu dan I9 sebagai Kepala Sekolah SMK N 6 Bengkulu. Selain, aktor negara yang ditemukan dalam berbagai macam penelitian terdahulu (Abd Rashid et al., 2020; Nugroho, 2020; Parsons & Draheim, 2009), penelitian ini menemukan bahwa beberapa sekolah juga memiliki kepentingan dalam pengembangan ekowisata.

Sedangkan aktor dari kelompok Civil society sebanyak 11 (sebelas) atau 61% aktor, yaitu I3 sebagai Ketua LPM dan Ketua LKM, selain itu juga aktif sebagai salah satu tokoh perempuan yang berpengaruh di tingkat kelurahan. I4 sebagai ketua RW 06 sekaligus sebagai salah satu tokoh pemuda yang cukup berpengaruh di kelurahan. I5 sebagai salah satu tokoh perempuan dan Ketua RW 02 Kampung Sejahtera atau kampung nelayan. I6 sebagai ketua RT 6, juga sebagai salah satu tokoh perempuan yang cukup aktif diberbagai kegiatan masyarakat. I10 merupakan salah satu aktor tokoh perempuan sekaligus sebagai pendamping sosial di Kecamatan Kampung Melayu. I11 adalah penghulu adat sebagai aktor tokoh adat, I12 sebagai tokoh agama, I13 sebagai ketua RW 01. I14 sebagai ketua karang taruna sebagai aktor Civil society. I15 sebagai tokoh masyarakat, I16 sebagai tokoh adat. Sedangkan aktor dari kelompok privat sector atau kelompok bisnis yaitu I17 sebagai salah satu tokoh pengusaha nelayan di Sumber Jaya dan I18pek sebagai salah satu pelaku usaha besar dibidang perdagangan. Memperkuat dan memperinci penelitian terdahulu (Bobtwash, 2001; Fafurida et al., 2020; Ramos & Prideaux, 2014) , aktor dari kelompok civil society terdiri dari pemuda, tokoh perempuan, penghulu adat, dan tokoh agama. Sementara itu, aktor dari kelompok *private sector* terdiri dari pengusaha nelayan .

Tingkat pendidikan aktor di Kelurahan Sumber Jaya Berdasarkan (Gambar 2) bahwa sebagian besar menamatkan pendidikan tingkat atas yaitu sebanyak 9 orang aktor sedangkan tamat pendidikan tingkat sarjana sebanyak 8 orang aktor. Sedangkan satu orang aktor yaitu tamat pendidikan SD yaitu I16 merupakan salah satu tokoh adat yang ada di Kelurahan Sumber Jaya. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, aktor yang berada di wilayah tersebut relative cukup

tinggi yaitu tingkat SMA dan Sarjana. Kondisi ini sejalan dengan kondisi lokasi yang berada di wilayah perkotaan.

Jenis pekerjaan aktor cukup beragam (Gambar 4) yaitu terdiri dari PNS sebanyak 5 orang aktor, Swasta sebanyak 5 orang, sebagai staff kelurahan 1 orang, Pelaku Usaha 1 orang, Pendamping Sosial 1 orang, Wiraswasta 2 orang, Petani 1 orang, Pengusaha Nelayan 1 orang, pengusaha dibidang perdagangan ada 1 orang aktor. Jenis pekerjaan aktor yang beragam sesuai dengan kondisi wilayah yang berada diwilayah perkotaan yang memiliki berbagai keragaman termasuk dibidang pekerjaan.

Aktor berdasarkan gender laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan aktor perempuan yaitu laki-laki sebanyak 10 (sepuluh) orang dan perempuan sebanyak 8 (delapan) orang aktor (Gambar 3). Berdasarkan pengamatan lapangan sebagian besar aktor yang aktif dalam berbagai kegiatan yaitu aktor dari kelompok gender perempuan, hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang berlangsung di tingkat kelurahan sebagian besar adalah perempuan. Bahkan Camat, Lurah dan berapa tokoh perempuan menduduki jabatan strategis di tingkat kelurahan. Misalkan sebagai ketua LPM, LKM dan ketua RW.

Derajat Kekuatan (*power*) Aktor/*Stakeholder*

Derajat kekuatan actor dalam pengembangan ekowisata di Pulau Baai yang diukur melalui 5 indikator yaitu 1) tingkat Pendidikan (*education*), 2) jaringan (*network*), 3) kekuatan massa (*Mass Power Capability*), 4) tipe kepemimpinan (*Leadership type*) dan 5) kekuatan ekonomi (*Financial Power*). Analisis derajat kekuatan sebagai pemetaan mengenai kapasitas *power* sebagai salah satu atribut stakeholders. Analisis kekuatan stakeholder berdasarkan pada tiga unsur penting diantaranya *power*, *legitimacy* dan *urgency*. *Power* merujuk pada seberapa besar aktor memiliki pengaruh. *Legitimacy* merujuk pada struktur kewenangan atau otoritas dan *Urgency*, merujuk pada seberapa besar desakan atau dorongan dari aktor atau stakeholder terhadap sebuah proyek atau kegiatan (Mitchell, Agle, & Wood, 1997).

Tabel 2. Derajat Kekuatan (power) Aktor Kelurahan Sumber Jaya

No	Nama	Jabatan	Derajat Kekuatan (Power)						
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	Total	Persentase
1	Informan 1 (I1)	Lurah	4	4	4	4	5	21	8,20
2	Informan 2 (I2)	Sekretaris Lurah	4	2	1	2	4	13	5,08
3	Informan 3 (I3)	Ketua LPM dan Ketua LKM	3	3	3	3	3	15	5,86
4	Informan 4 (I4)	Ketua RW 06/Tokoh Pemuda/Ketua Kelompok Wisata Mangrove	3	3	3	3	3	15	5,86
5	Informan 5 (I5)	Ketua RW 02 Kampung Sejahtera/ Tokoh Perempuan	4	2	3	3	2	14	5,47
6	Informan 6 (I6)	Ketua RT 06/Tokoh Perempuan/Kelo mpok Usaha	3	3	3	3	3	15	5,86
7	Informan 7 (I7)	Kepala Sekolah SD 105 Kampung Bahari	4	3	1	2	3	13	5,08
8	Informan 8 (I8)	Kepala Sekolah SMP N 25 Bengkulu	4	3	1	3	3	14	5,47
9	Informan 9 (I9)	Kepala Sekolah SMK N 6 Bengkulu	4	3	1	2	3	13	5,08
10	Informan 10 (I10)	Tokoh Perempuan	4	3	3	3	3	16	6,25
11	Informan 11 (I11)	Penghulu Adat	3	2	3	4	3	15	5,86
12	Informan 12 (I12)	Tokoh Agama	3	2	3	3	3	14	5,47
13	Informan 13 (I13)	Ketua RW 01	3	3	3	3	3	15	5,86

No	Nama	Jabatan	Derajat Kekuatan (Power)						
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	Total	Persentase
14	Informan 14 (I14)	Ketua Karang Taruna/Tokoh pemuda	3	2	2	2	2	11	4,30
15	Informan 15 (I15)	Tokoh Masyarakat	3	2	2	2	3	12	4,69
16	Informan 16 (I16)	Tokoh Adat	1	2	3	3	2	11	4,30
17	Informan 17 (I17)	Pelaku Usaha Besar (tokeh)	4	3	1	2	5	15	5,86
18	Informan 18 (I18)	Pelaku Usaha Besar (tokeh)	3	3	1	2	5	14	5,47
Derajat kekuatan (Power)								256	100,00

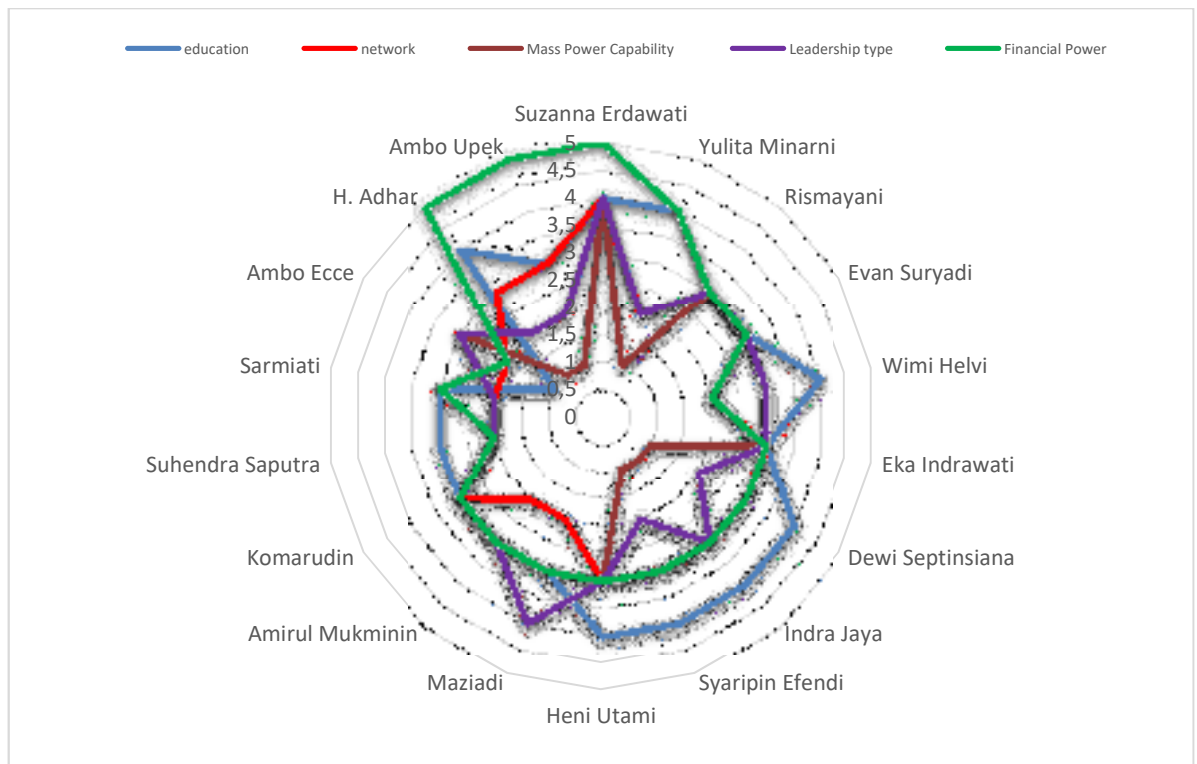
Sumber: FGD dan Kuesioner, 2020

Keterangan:

- (a) Pendidikan (*education*)
- (b) jaringan (*network*),
- (c) kekuatan massa (*Mass Power Capability*),
- (d) tipe kepemimpinan (*Leadership type*)
- (e) kekuatan ekonomi (*Financial Power*)

Hasil analisis temuan lapangan (Tabel 2) berupa derajat kekuatan masing-masing aktor di Kelurahan Sumber Jaya. Berdasarkan indikator kekuatan yang paling tinggi yaitu Lurah (I1) total skor 21 (8,20 persen) masuk kedalam kategori *high power*. Tokoh perempuan (I10) juga sebagai aktor yang memiliki *high power* dengan total skor 16 atau 6,25 persen. Sedangkan aktor yang memiliki skor 15 atau *high power* yaitu sebanyak 6 orang aktor I3 Ketua LPM/LKM, I4 berkedudukan sebagai ketua RW 06/tokoh pemuda, I6 sebagai ketua RT 06 dan ketua kelompok pelaku usaha, I11 sebagai penghulu adat atau tokoh adat, I13 sebagai ketua RW 01 dan I17 sebagai pelaku usaha besar (tokeh) yang bergerak dibidang kelautan atau nelayan.

Gambar 5. Spiderweb derajat kekuatan stakeholder pengembangan ekowisata mangrove Pulau Baai



Sumber : Analisis Data Primer, 2020.

Apabila dilihat dari 18 sampel informan dalam penelitian ini, distribusi kekuatan dalam pengembangan wisata masih dibawah 10 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada kekuatan yang paling dominan yang dapat menggerakkan pengembangan ekowisata namun semua mempunyai porsi yang hamper sama sehingga dalam penentuan pengembangan Kawasan ekowisata mangrove lebih ditentukan bagaimana diskusi antar *stakeholder* dapat sinergis untuk kepentingan bersama. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang menemukan bahwa dalam suatu lokasi ekowisata, biasanya ada aktor tertentu yang terkuat seperti pemerintah, masyarakat adat, masyarakat pengelola ekowisata, dan pihak swasta pelaku ekowisata (Cárcamo & Gaymer, 2013; Ceballos-Lascurain, 1996; Li, 2012; Ohl-Schacherer, Mannigel, Kirkby, Shepard Jr., & Yu, 2008; Pappas, 2008), penelitian ini menemukan bahwa stakeholder dalam ekowisata ini cenderung memiliki kekuatan yang setara.

Hasil analisis derajat kekuatan stakeholders berdasarkan pada indikator kekuatan *education, network, Mass Power Capability, Leadership type* dan *Financial Power*. Temuan tersebut sejalan dengan kata kunci stakeholders menurut Grimble bahwa yang menjadi karakteristik utama stakeholders adalah kekuatan dan legitimasi sebagai basis kekuatan atau power. Temuan lapangan menunjukkan bahwa aktor yang memiliki kekuatan tinggi adalah aktor yang memiliki basis legitimasi formal maupun legitimasi informal.

Grimble (1998) mendefinisikan stakeholder dalam perspektif posisi sosial dan pengaruh yang memiliki kekuasaan, legitimasi dan kepentingan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa masing-masing aktor baik individu, kelompok, organisasi baik formal maupun informal memiliki tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Tentunya hal itu menandakan adanya variasi atau kompleksitas terhadap aspek kekuatan atau pengaruh dari masing-masing stakeholder dalam hal kegiatan pengembangan ekowisata mangrove di Pulau Baai Bengkulu.

Derajat Kepentingan (*interest*) Aktor/Stakeholder

Derajat kepentingan stakeholder dalam pengembangan ekowisata di Pulau Baai yang diukur melalui 5 indikator yaitu ekonomi, pemberdayaan, tenaga kerja, lingkungan dan infrastruktur.

Tabel 3. Derajat Kepentingan *Stakeholders*

No	Nama	Jabatan	Derajat Kekuatan (Power)						
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	Total	Persentase
1	Informan 1 (I1)	Lurah	5	5	3	5	4	22	8,46
2	Informan 2 (I2)	Sekretaris Lurah	2	3	2	2	4	13	5,00
3	Informan 3 (I3)	Ketua LPM dan Ketua LKM	4	4	3	4	4	19	7,31
4	Informan 4 (I4)	Ketua RW 06/Tokoh Pemuda/Ketua Kelompok Wisata Mangrove	4	4	3	4	4	19	7,31
5	Informan 5 (I5)	Ketua RW 02 Kampung Sejahtera/ Tokoh Perempuan	3	4	2	3	4	16	6,15
6	Informan 6 (I6)	Ketua RT 06/Tokoh Perempuan/Kelompok Usaha	4	4	2	5	4	19	7,31

7	Informan 7 (I7)	Kepala Sekolah SD 105 Kampung Bahari	2	2	1	3	5	13	5,00
8	Informan 8 (I8)	Kepala Sekolah SMP N 25 Bengkulu	2	2	1	3	5	13	5,00
9	Informan 9 (I9)	Kepala Sekolah SMK N 6 Bengkulu	4	4	3	3	5	19	7,31
10	Informan 10 (I10)	Tokoh Perempuan	4	4	2	3	4	17	6,54
11	Informan 11 (I11)	Penghulu Adat	2	3	2	2	3	12	4,62
12	Informan 12 (I12)	Tokoh Agama	2	2	1	3	3	11	4,23
13	Informan 13 (I13)	Ketua RW 01	3	3	1	3	3	13	5,00
14	Informan 14 (I14)	Ketua Karang Taruna/Tokoh pemuda	2	3	2	3	3	13	5,00
15	Informan 15 (I15)	Tokoh Masyarakat	3	3	1	2	2	11	4,23
16	Informan 16 (I16)	Tokoh Adat	2	3	1	2	2	10	3,85
17	Informan 17 (I17)	Pelaku Usaha Besar (tokeh)	2	2	1	2	3	10	3,85
18	Informan 18 (I18)	Pelaku Usaha Besar (tokeh)	2	2	1	2	3	10	3,85
Derajat kepentingan (<i>interest</i>)								260	100,00

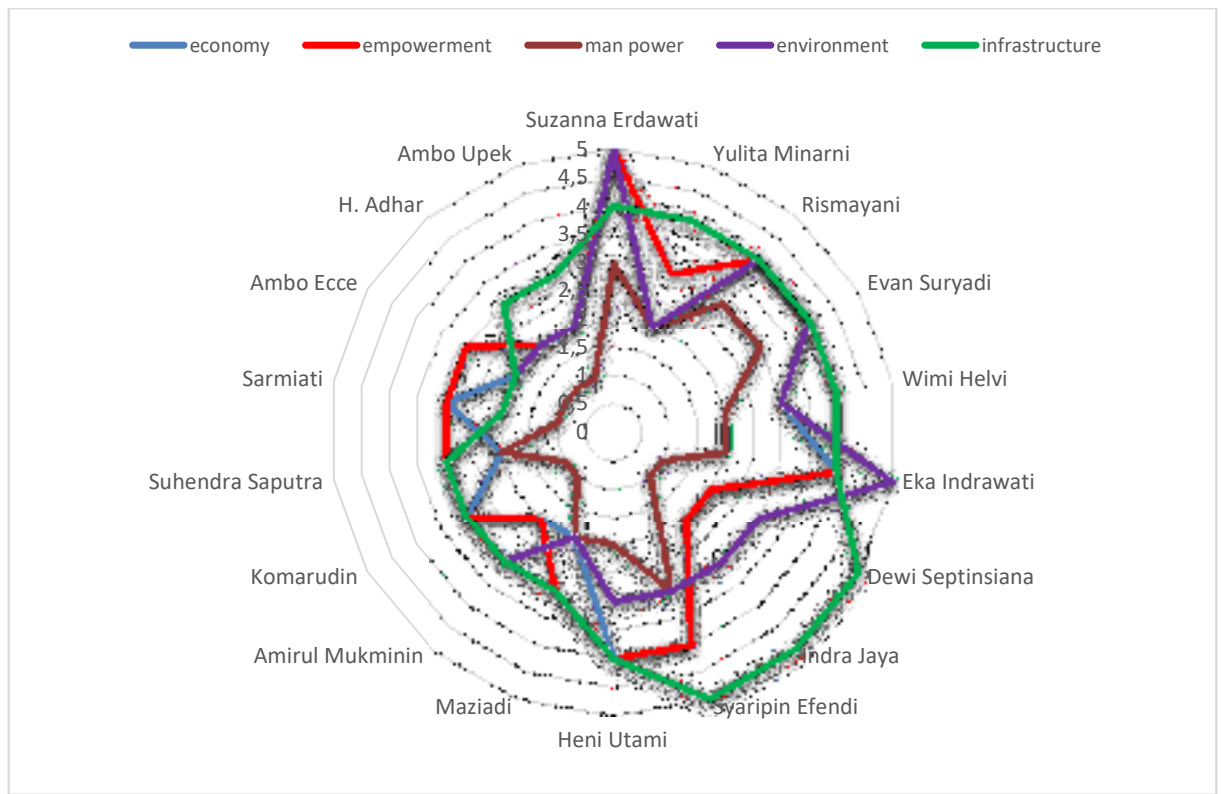
Sumber: FGD dan Kuesioner, 2020

Keterangan:

- (f) ekonomi (*economy*)
- (g) pemberdayaan (*empowerment*),
- (h) tenaga kerja (*man power*),
- (i) lingkungan (*environment*)
- (j) infrastruktur (*infrastructure*)

Stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan yang paling tinggi yaitu Lurah I1 dengan total skor 22 dari skor maksimal 25, artinya aktor tersebut sebagai salah satu aktor yang memiliki kepentingan yang sangat tinggi atau *high interest*. Selain itu ada 4 aktor yang memiliki skor total sama yaitu 19 terdiri dari I3 sebagai ketua LPM dan LKM, I4 sebagai Ketua RW 06 Kampung Bahari sekaligus sebagai tokoh pemuda, I6 sebagai Ketua RT 06 sekaligus sebagai ketua kelompok usaha, I9 sebagai Kepala Sekolah SMK 6 Bengkulu. Keempat aktor tersebut juga termasuk kedalam kategori aktor dengan *high interest*. Selain itu aktor lain yang masuk kedalam kategori high interest yaitu I10 sebagai pendamping sosial dan tokoh perempuan dengan skor 17. I5 sebagai Ketua RW 02 Kampung Sejahtera dengan skor 16.

Gambar 6. Spiderweb Derajat Kepentingan Stakeholder Pengembangan Ekowisata Mangrove Pulau Baai .



Sumber : Analisis Data Primer, 2020.

Analisis kepentingan (*interest*) stakeholder diatas merupakan bagian penting dalam pemetaan stakeholders. Karena aspek kepentingan akan menjadi poin yang juga sangat penting dalam keterlibatan aktor dalam pengembangan ekowisata mangrove Pulau Baai. Temuan lapangan menemukan beberapa aktor yang berada pada level *high interest*, artinya aktor tersebut memiliki kepentingan yang sangat tinggi terhadap pengemabnagn ekowisata mangrove. Tentunya pemetaan kepentingan ini sangat penting untuk mempredeksikan kesuksesan sebuah kegiatan atau program. Pemetaan *stakeholder* (Walker, Bourne, & Shelley, 2008) adalah suatu upaya untuk menggali dan menilai kepentingan dari aktor-aktor kunci baik dari individu, kelompok atau ornisasi yang memberikan pengaruh pada keberhasilan atau kegagalan sebuah program.

Peran stakeholder dalam pengembangan ekowisata mangrove

Hasil kajian potensi pengembangan ekowisata mangrove yang diteliti oleh Joandani, et. al. (2019) di Desa Pasar Banggi, Kabupaten Rembang yang menemukan bahwa salah satu upaya penting dalam pengembangan ekowisata adalah kualitas sumberdaya manusia dalam menangani wisatawan. Upaya-upaya dalam pengembangan wisata termasuk ekowisata mangrove harus menjadikan masyarakat sebagai subjek, sehingga kontribusi dari masyarakat akan sangat besar memberikan pengaruh pada keberhasilan sebuah program atau kegiatan terutama dikawasan pengembangan pesisir. Kelembagaan menjadi poin penting untuk menuju pada keberlanjutan sebuah program (Diarto et.al, 2012).

Kelembagaan tersebut sebagai wujud dan komitmen yang lahir dan terbentuk dari partisipasi masyarakat atau stakeholder di tingkat lokal. Kelembagaan inilah yang akan menjamin keberlanjutan sebuah program yang akan digagas atau sudah diimplementasikan. Bahkan dalam berbagai program pengembangan masyarakat dan kawasan kelembagaan merupakan salah satu indikator keberhasilan sebuah program. Temuan penelitian ini menunjukkan stakeholder memiliki tingkat kekuatan dan kepentingan yang berbeda-beda, ada yang masuk *high power, low power, high interest* maupun *low interest*. Fakta temuan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing stakeholder memberikan kontribusi yang tentunya berbeda-beda dalam pengembangan ekowisata mangrove di Pulau Baai. Temuan lain yang penting adalah perlunya adanya dorongan untuk pembentukan kelembagaan berbasis masyarakat sebagai bagian dari stakeholder penting dalam upaya yang lebih terstruktur dan konstruktif dalam pengembangan ekowisata mangrove, sebagai upaya menuju pada keberlanjutan sesuai dengan cita-cita masyarakat setempat (Karst, 2017).

SIMPULAN

Penelitian pengembangan ekowisata mangrove di Pulau Baai berbasis dari kekuatan dan kepentingan stakeholder, menunjukkan bahwa masing-masing stakeholder baik dari unsur *state, civil society* dan *privat sector*, sama-sama memiliki kontribusi dalam pengembangan wisata tersebut. Menarik dari hasil

temuan pemetaan kekuatan dan kepentingan stakeholder adalah adanya aktor state yang memiliki kekuatan dan kepentingan yang sangat tinggi, selain itu aktor masyarakat sipil juga sebagian memiliki kekuatan dilevel *high power* dan *high interest*. Artinya keberhasilan pengembangan wisata tersebut terwujud dengan baik jika masing-masing stakeholder dapat bersinergi dengan baik dalam upaya pengembangan ekowisata mangrove tersebut. Penelitian ini masih perlu disempurnakan lagi untuk melihat bagaimana dampak kekuatan dan kepentingan stakeholder tersebut dalam pengelolaan ekowisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rashid, I. M., Mohd.yusof, A., Abu Samah, I. H., Wan Husain, W. A. F., Shafiai, S., & Amlus, M. H. (2020). Rethinking tourism impact and development on local community in Perlis, Malaysia. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 11(8), 2043–2052.
[https://doi.org/10.14505/jemt.v11.8\(48\).16](https://doi.org/10.14505/jemt.v11.8(48).16)
- Amin, A., Zaehring, J. G., Schwilch, G., & Koné, I. (2015). People, protected areas and ecosystem services: a qualitative and quantitative analysis of local people's perception and preferences in C ôte d'I voire. In *Natural Resources Forum* (Vol. 39, pp. 97–109). Wiley Online Library.
- Arief, A. (2003). Hutan mangrove fungsi dan manfaatnya. *Kanisius*. Yogyakarta, 47.
- Avau, J., Cunha-Lignon, M., De Myttenaere, B., Godart, M.-F., & Dahdouh-Guebas, F. (2011). The commercial images promoting Caribbean mangroves to tourists: Case studies in Jamaica, Guadeloupe and Martinique. *Journal of Coastal Research*, 1277–1281.
- Bobtwash, R. (2001). Indigenous peoples, NGOs and the international year of ecotourism. *Industry and Environment*, 24(3–4), 48.
- Borrini, G., Kothari, A., & Oviedo, G. (2004). *Indigenous and local communities and protected areas: Towards equity and enhanced conservation: Guidance on policy and practice for co-managed protected areas and community conserved areas*. IUCN.
- Buckley, R. (1994). A framework for ecotourism. *Annals of Tourism Research*, 21(3), 661–665.
- Cárcamo, P. F., & Gaymer, C. F. (2013). Interactions between spatially explicit conservation and management measures: Implications for the governance of marine protected areas. *Environmental Management*, 52(6), 1355–1368.
<https://doi.org/10.1007/s00267-013-0167-9>

- Ceballos-Lascurain, H. (1993). Ecotourism as a worldwide phenomenon. *Ecotourism as a Worldwide Phenomenon.*, 12–14.
- Ceballos-Lascurain, H. (1996). *Tourism, ecotourism, and protected areas: The state of nature-based tourism around the world and guidelines for its development*. Iucn.
- Chirozva, C. (2015). Community agency and entrepreneurship in ecotourism planning and development in the Great Limpopo Transfrontier Conservation Area. *Journal of Ecotourism*, 14(2–3), 185–203.
<https://doi.org/10.1080/14724049.2015.1041967>
- Dahdouh-Guebas, F., Kairo, J. G., Jayatissa, L. P., Cannicci, S., & Koedam, N. (2002). An ordination study to view vegetation structure dynamics in disturbed and undisturbed mangrove forests in Kenya and Sri Lanka. *Plant Ecology*, 161(1), 123–135.
- DiCicco-Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview. *Medical Education*, 40(4), 314–321.
- Dologlou, N., & Katsoni, V. (2016). Ecotourism in protected areas, a literature review. *ECOCLUB. Com Ecotourism Paper Series*, 38, 1–20.
- Ecotourism, T. G. (2005). The International Ecotourism Society (TIES).
- Fafurida, F., Oktavilia, S., Prajanti, S. D. W., & Maretta, Y. A. (2020). Sustainable strategy: Karimunjawa national park marine ecotourism, Jepara, Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 3234–3239.
- Fennell, D. A. (2001). A content analysis of ecotourism definitions. *Current Issues in Tourism*, 4(5), 403–421.
- Forje, G. W., Tchamba, M. N., & Eno-Nku, M. (2020). Scientific African.
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 40–53.
- Harilal, V. (2018). Ecotourism and alternative livelihood strategies in Cameroon's protected areas.
- Hasnanda, O. (2019). Jejaring kekuasaan aktor dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat di Provinsi Aceh. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 9(2), 380–393.
- Higham, J. (2007). Ecotourism: Competing and conflicting schools of thought. *Critical Issues in Ecotourism: Understanding a Complex Tourism Phenomenon*, 1–14.
- Imanishimwe, A., Nsengimana, V., & Nsengumuremyi, C. (2018). Contribution

- of ecotourism to the conservation of Nyungwe National Park in Rwanda. *J Tourism Hospit*, 7(348), 269–2167.
- Karst, H. (2017). “This is a holy place of Ama Jomo”: buen vivir, indigenous voices and ecotourism development in a protected area of Bhutan. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(6), 746–762.
<https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1236802>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. (2020). *Kondisi Mangrove Indonesia*.
- Kimengsi, J. N., Aung, P. S., Pretzsch, J., Haller, T., & Auch, E. (2019). Constitutionality and the co-management of protected areas: Reflections from Cameroon and Myanmar. *International Journal of the Commons*, 13(2).
- Kimengsi, J. N., & Azibo, B. R. (2017). Repositioning local institutions in natural resource management: perspectives from Sub-Saharan Africa. *Journal of Contextual Economics*, 137(1–2), 149–172.
- Kuvan, Y., & Akan, P. (2012). Conflict and agreement in stakeholder attitudes: Residents’ and hotel managers’ views of tourism impacts and forest-related tourism development. *Journal of Sustainable Tourism*, 20(4), 571–584.
<https://doi.org/10.1080/09669582.2011.617824>
- Li, W. (2012). *Tourism, local community and natural resources: Tourism impact assessment and tourism management analysis in the Jiuzhaigou biosphere reserve, China. Ecotourism and Environmental Sustainability: Principles and Practice*. Ashgate Publishing Ltd. Retrieved from
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84936953435&partnerID=40&md5=b0fff517095ce6791288551646db17ed>
- Macintosh, D. J., & Ashton, E. C. (2002). A review of mangrove biodiversity conservation and management. *Centre for Tropical Ecosystems Research, University of Aarhus, Denmark*.
- Mendoza-Ramos, A., & Prideaux, B. (2018). Assessing ecotourism in an Indigenous community: using, testing and proving the wheel of empowerment framework as a measurement tool. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(2), 277–291. <https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1347176>
- Miller, M. L. (1993). The rise of coastal and marine tourism. *Ocean & Coastal Management*, 20(3), 181–199.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review*, 22(4).
<https://doi.org/10.5465/AMR.1997.9711022105>
- Mukul, S. A. (2007). Biodiversity conservation strategies in Bangladesh: the state of protected areas. *Tigerpaper*, 34(3), 28–32.

- Nelson, J. G. (1994). The spread of ecotourism: Some planning implications. *Environmental Conservation*, 21(3), 248–255.
- Nugroho, A. W. (2020). Ecotourism implementation for tropical forest resource conservation in Indonesia: Legal aspects. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 533). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/533/1/012001>
- Ohl-Schacherer, J., Mannigel, E., Kirkby, C., Shepard Jr., G. H., & Yu, D. W. (2008). Indigenous ecotourism in the Amazon: A case study of Casa Matsigenka in Manu National Park, Peru. *Environmental Conservation*, 35(1), 14–25. <https://doi.org/10.1017/S0376892908004517>
- Pappas, N. V. (2008). City of Rhodes: Residents' attitudes toward tourism impacts and development. *Anatolia*, 19(1), 51–70. <https://doi.org/10.1080/13032917.2008.9687053>
- Parsons, E. C. M., & Draheim, M. (2009). A reason not to support whaling - a tourism impact case study from the Dominican Republic. *Current Issues in Tourism*, 12(4), 397–403. <https://doi.org/10.1080/13683500902730460>
- Pyhälä, A. A., Oroza, A. O., & Counsell, S. (2016). Protected Areas in the Congo Basin: Failing Both People and Biodiversity?
- Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.
- Ramos, A. M., & Prideaux, B. (2014). Indigenous ecotourism in the Mayan rainforest of Palenque: empowerment issues in sustainable development. *Journal of Sustainable Tourism*, 22(3), 461–479. <https://doi.org/10.1080/09669582.2013.828730>
- Rudianto, & Ridho, M. F. (2019). Sustaining marine ecotourism through multi-use planning for securing mangrove ecosystems. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 10(6), 1281–1294. [https://doi.org/10.14505/jemt.v10.6\(38\).10](https://doi.org/10.14505/jemt.v10.6(38).10)
- Sama, G. L., & Molua, E. L. (2019). Determinants of ecotourism trade in Cameroon. *Natural Resources*, 10(6), 202–217.
- Sengupta, R. (2010). Mangroves: soldiers of our coasts. *New Delhi: TERI*, 32.
- Walker, D. H. T., Bourne, L. M., & Shelley, A. (2008). Influence, stakeholder mapping and visualization. *Construction Management and Economics*, 26(6). <https://doi.org/10.1080/01446190701882390>
- Wearing, S., & Neil, J. (2009). *Ecotourism*. Routledge.